

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK

ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KECAMATAN LENEK

Rana Syarif Hidayat

Universitas Gunung Rinjani

Corresponding author: ranasyarifhidayat@gmail.com

Kata Kunci:

Good Corporate Governance, Sistem Informasi Akuntansi, Kinerja Keuangan, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Keyword

Good Corporate Governance, Accounting Information System, Financial Performance, Accountability of Village Financial Management

ABSTRAK

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Analisis Pengaruh Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Sistem Informasi Akuntansi Dan Kinerja Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Lenek. Jenis Penelitian Ini Adalah Penelitian Sebab Akibat. Tehnik Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Ini Adalah Penelitian Ini Dilakukan Pada Dua Kantor Desa Yang Ada Di Kecamatan Lenek, Dengan Menggunakan Penyebaran Kuesioner Untuk Pengumpulan Data Dan Responden Sebanyak 50 Orang. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Secara Simultan variable *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan secara parsial variable *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the influence of the implementation of Good Corporate Governance Accounting Information Systems and Financial Performance on the Accountability of Village Financial Management in Lenek District. This type of research is a cause and effect study. The sampling technique in this study is This study was conducted at two village offices in Lenek District, using questionnaires for data collection and 50 respondents. The results of the study indicate that simultaneously the variables of Good Corporate Governance, Accounting Information Systems, and Financial Performance do not affect the Accountability of Village Financial Management, while partially the variables of Good Corporate Governance, Accounting Information Systems and Financial Performance do not affect the Accountability of Village Financial Management

1. Pendahuluan

Pembangunan desa menjadi isu yang menarik untuk dikaji. Tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya Indonesia mengeluarkan dana desa sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diharapkan dana ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Besarnya tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Kenyataannya, pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak disertai dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik. Oleh karena itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintahan desa masih jauh dari harapan (Aminudin, 2019).

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan guna mendukung pembangunan desa yang lebih meningkat dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat kompleks, menjadikan alasan bagi desa untuk berkembang. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan ADD, semua lapisan melalui dari aparat yang berwenang hingga masyarakat harus mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap apatis dalam menjalankan segala sesuatu mulai dari perencanaan, pengelolaan hingga pertanggungjawaban. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi respontabilitas manjerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada tiap jajaran aperatur bertanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang. (Oktavia, 2022:5)

Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Mardiasmo (2012) mendefinisikan akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggung-jawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Risyana dan Idang (2017). Banyak faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa diantaranya adalah *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kinerja Keuangan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Ia berkaitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat menunjang upaya pemerintah

dalam menegakkan good governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk menerapkan good governance dalam birokrasinya dalam rangka menciptakan Pemerintah yang bersih dan berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Pemerintah juga makin menyadari perlunya penerapan good governance di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya good public governance dan partisipasi masyarakat. Asas GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan, yang diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).

Ramadhan (2018), menemukan bahwa GCG penting untuk memastikan bahwa stakeholders memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan. GCG berperan dalam meningkatkan akuntabilitas karena memfasilitasi pemantauan dan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, GCG tidak hanya menjadi kerangka kerja untuk pengelolaan pemerintah yang baik, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada peningkatan tingkat akuntabilitas terhadap berbagai stakeholders yang terlibat.

Penelitian menurut Pratolo (2018) membuktikan bahwa prinsip-prinsip GCG yakni: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Penelitian menurut Damayanti dan Fachrurrozie (2017) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya transparansi, masyarakat menjadi lebih percaya dan aktif dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya seperti orang dan perlengkapan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Output dari sistem informasi akuntansi adalah informasi-informasi yang nantinya akan berguna dalam mengukur kinerja keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan tidak jarang terdapat kesalahan-kesalahan ataupun ketidakakuratan dalam pencatatan (Kaharuddin, 2017: 2).

Sistem Informasi Akuntansi sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol, dan melaporkan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk menunjang sistem informasi akuntansi maka Pemerintah melalui BPKP membuat aplikasi yang dapat membantu pengelolaan dana desa yaitu aplikasi Siskeudes. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes juga membantu mempercepat pelaporan dan memudahkan pengawasan oleh pemerintah pusat maupun daerah karena menyediakan informasi *real time* Muhammad Nur Aziiz, Sawitri Dwi Prastiti (2019).

Setiawan (2018) menemukan bahwa desa-desa yang mengimplementasikan siskeudes menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, serta pengurangan kasus penyimpangan anggaran. Dengan demikian, Siskeudes memainkan peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Suharman dan Lusiono (2017) dan Nintyari et al.(2019) yang menyatakan penggunaan sistem informasi akuntansi yaitu aplikasi siskeudes sangat berdampak baik terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Luthfiani dkk (2020) menyatakan juga aplikasi Siskeudes berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sejalan dengan itu, penelitian oleh Muhammad Nur Aziiz, Sawitri Dwi Prastiti (2019) menunjukkan signifikansi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berikut yang diduga mempengaruhi akuntabilitas adalah Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan dimiliki desa dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desanya agar tidak memiliki kebergantungan sepenuhnya kepada pemerintah pusat serta mempunyai kebebasan penuh menggunakan/memanfaatkan dana bagi kepentingan masyarakat desa untuk batasan-batasan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bastian (2006:7). Selanjutnya wenny (2012) menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintah guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektifitas juga mengawasi biaya actual jika dibandingkan dengan biaya dalam rencana anggaran. Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja.

Peter Brownell (2017 dalam Rahayu) mengemukakan bahwa kinerja keuangan yang baik mencerminkan tingkat akuntabilitas yang tinggi dalam organisasi. Ini karena laporan keuangan yang jelas dan transparan mendukung akuntabilitas publik dan internal. Dengan demikian, kinerja keuangan yang baik tidak hanya menjadi indikator prestasi organisasi, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan akuntabilitas, Laporan keuangan yang tepat waktu, akurat, dan mudah dipahami membantu memastikan bahwa organisasi bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya finansialnya secara efektif.

Susan Newberry (2018) menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan yang akurat dan sistematis dapat meningkatkan akuntabilitas organisasi. Dengan mengukur dan melaporkan kinerja keuangan secara teratur, organisasi dapat menunjukkan tanggung jawab mereka kepada pemangku kepentingan. Alope Ghosh (2017) menekankan bahwa kualitas informasi keuangan berkontribusi pada tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Kualitas ini mencakup kejelasan, keterbacaan, dan keterpercayaan informasi keuangan yang disediakan kepada pemangku kepentingan.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang memandang fenomena/gejala itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan yang bersifat Hubungan Kausalitas (sebab akibat) (Sugiyono, 2014: 8). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Good corporate governance Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Keuangan* secara parsial dan simultan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh adalah metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel, seluruh jumlah populasi dijadikan sampel dikarenakan jumlah populasi relatif kecil (Sugiyono, 2018). Alasan penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh karena jumlah populasi kecil, maka sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh jumlah populasi untuk digunakan sebagai responden sebanyak 59 responden.

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Data Primer, Data Primer yang dihasilkan dalam penelitian ini merupakan hasil dari tanggapan responden terhadap Variabel-Variabel penelitian yang diuji atau melakukan survei memberikan kuisioner kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara Desa, dan Masyarakat.

4. Hasil dan Pembahasan

Desa Lenek Pesiraman adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Desa Lenek Pesiraman terdiri atas 14 dusun yaitu Dusun Gubuk

Bagek, Dusun Gubuk Bagek Daya, Dusun Gubuk Bagek Tengah, Dusun Karang Tojang, Dusun Karang Tojang Indah, Dusun Koloh Petung Timuk, Dusun Koloh Petung Baret, Dusun Karang Bila, Dusun Dasan Tapen.

Desa Lenek Pesiraman adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur. Desa Lenek Pesiraman terdiri atas 14 dusun yaitu Dusun Gubuk Bagek, Dusun Gubuk Bagek Daya, Dusun Gubuk Bagek Tengah, Dusun Karang Tojang, Dusun Karang Tojang Indah, Dusun Koloh Petung Timuk, Dusun Koloh Petung Baret, Dusun Karang Bila, Dusun Dasan Tapen. Desa Lenek Pesiraman memiliki luas wilayah 213,6 Ha/M² dengan jumlah penduduk 5.138 jiwa dengan pembagian 2.492 jiwa merupakan laki-laki dan 2.646 jiwa merupakan perempuan. Mata pencaharian pokok penduduk desa yaitu sebagai buruh tani.

Analisis regresi berganda adalah suatu perluasan dari teknik regresi apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi terhadap Variabel terikat (Arikunto, 2013). Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk pemecahan masalah penelitian.

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,590	5,361		3,654	0,001
GCG	0,112	0,208	0,089	0,536	0,595
SIA	0,069	0,155	0,075	0,446	0,658
Kinerja Keuangan	-0,148	0,151	-0,144	-0,979	0,333

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: data yang diolah SPSS 25

$$Y = 19,590 + 0,112 X_1 + 0,069 X_2 - 0,148 X_3$$

Nilai konstanta sebesar 19,590 artinya jika *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Keuangan bernilai 0 maka nilai Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa adalah 19,590. Nilai koefisiensi *Good Corporate Governance* 0,112 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai *Good Corporate Governance* sebanyak satu kesatuan maka akan meningkatkan kenaikan akuntabilitas sebesar 0,112. Nilai koefisiensi Sistem Informasi Akuntansi 0,069 yang artinya apabila terjadi kenaikan nilai Sistem Informasi Akuntansi sebanyak satu kesatuan maka akan meningkatkan kenaikan akuntabilitas sebesar 0,069. Nilai koefisiensi Kinerja Keuangan -0,148 yang artinya jika nilai Kinerja Keuangan mengalami penurunan satu kesatuan maka akan menurunkan nilai akuntabilitas sebesar 0,148.

Tabel 2 Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,590	5,361		3,654	0,001
GCG	0,112	0,208	0,089	0,536	0,595
SIA	0,069	0,155	0,075	0,446	0,658
Kinerja Keuangan	-0,148	0,151	-0,144	-0,979	0,333

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil statistik yang dilakukan diperoleh dari nilai signifikan terdapat pada tabel 2 diatas, untuk pengaruh variabel *Good Corporate Governance* terhadap Akuntabilitas sebesar $0,595 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil dari nilai t hitung $0,536 <$ dari t tabel $2,012$ artinya bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Maka disimpulkan secara parsial variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa hal ini dikarenakan bahwa aparatur desa kurang ramah dan prinsip- prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi atau terbuka, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sulit diterapkan dalam desa karena memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Penelitian ini tidak mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani, S. (2020) yang menyatakan bahwa variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil statistic yang dilakukan dari nilai signifikan terdapat pada variabel sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar $0,658 > 0,05$ artinya H_0 diterima H_a ditolak hasil dari nilai t hitung $0,446 <$ dari t tabel $2,012$ artinya bahwa H_a ditolak H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikarenakan para pengelola keuangan desa tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menggunakan Siskuedes sehingga sistem tersebut tidak digunakan secara efektif. Penelitian ini tidak mendukung Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadil (2020) yang menyatakan bahwa variable Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil statistic yang dilakukan dari nilai signifikan terdapat pada variabel kinerja keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebesar $0,333 > 0,05$ artinya H_0 diterima H_a ditolak hasil dari nilai t hitung $-0,979 <$ dari t tabel $2,012$ artinya bahwa H_a ditolak H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel kinerja keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikarenakan aparatur desa mengeluarkan dana untuk proyek yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh Masyarakat sehingga mengakibatkan pemborosan dana. Penelitian yang dilakukan oleh Amri, M. (2019) yang

menyatakan bahwa variable Kinerja Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan pengujian statistic yaitu signifikan $0,572 > 0,05$ dan F hitung $0,675 < F$ table 2,81 maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Good Corporate Governance* tidak mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa hal ini dikarenakan bahwa aparatur desa kurang ramah dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi atau terbuka, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan sulit diterapkan dalam desa karena memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikarenakan para pengelola keuangan desa tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menggunakan Siskuedes sehingga sistem tersebut tidak digunakan secara efektif. Kinerja Keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dikarenakan aparatur desa mengeluarkan dana untuk proyek yang tidak benar-benar dibutuhkan oleh Masyarakat sehingga mengakibatkan pemborosan dana.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas dapat ditarik Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya variabel Sistem Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Hasil analisis statistic bahwa secara simultan variabel *Good Corporate Governance*, Sistem Informasi Akuntansi, dan Kinerja Keuangan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Daftar Pustaka

- Aminudin, (2019). Impementation of Good Village Governance in Village Development. Jurnal. Vol 3. No 1. Bengkulu
- Bulandari, Dan Damayanti. (2020) Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Badung. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 8.3: 641-659, ISSN: 2302-8559.
- Ghozali. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS Semarang: Badan Universitas Diponegoro.
- Heriyanto, Anas (2019). Penerapan Prinsip-prinsip good corporate governance dalam tata kelola pemerintahan desa triharjo kecamatan sleman Kabupaten Sleman. Artikel. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kaharuddin, (2017:2) Sistem Informasi Akuntansi pengelolaan keuangan pada pemerintah Desa Reuadang kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2006: 1) Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.

- Luthfiani (2020) Aplikasi Siskeudes berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mardiasmo (2012), Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi sektor publik: Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2 No. 1 Mei 2006.
- Meutia, Rita dan Nurfitriana. (2018). Pengaruh penerapan Good Corporate Governance terhadap penyusunan anggaran Berbasis Kinerja pada pemerintah aceh. *Jurnal Akuntansi dan keuangan*. Vol 1, nomer 2. Agustus 2018 Halaman 93-171
- MN Aziiz, SD Prastiti (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa- Universitas Negeri Malang-*Jurnal Akuntansi Aktual*, 2019- core.ac.uk
- Mulyadi (2003: 6), Sistem Informasi Akuntansi, Indikator Sistem Informasi Akuntansi.
- Oktavia (2022: 5). Pengelolaan Anggaran Dana Desa.
- Peter Brownell (2017 dalam Rahayu) Kinerja keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, Diana. (2017). Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi. *Jurnal. Universitas Gunadarma*. Depok (Papers.Gunadarma.Ac.Id).
- Pratolo, Surya. (2018). Peran Good Corporate Governance (GCG) untuk Mengwujudkan Kinerja Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah Dalam Menghadapi Tantangan Global (Studi pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Ramadhan (2018), Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Riadi dan Saputra (2016), Pengaruh pengendalian internal dan penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Manajerial. Vol, 16.2 Universitas Udayana Bali
- Risya, Umami dan Nurodin, Idang (2017) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi Pajak dan Manajemen)*. 6 (11) hal 74-80 ISSN 2088-6969
- Setiawan (2018), Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siregar, (2013: 55-57) Uji Reliabilitas. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono, (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono, (2018) Pengertian Sampel Jenuh.
- Suharman dan Lusiono (2017), dan Nintyari (2019) Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi pada Aplikasi Siskeudes
- Susan Newberry (2018), Kinerja Keuangan yang akurat dan sistematis meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.
- Wenny, C.D (2012). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal ilmiah STIE MPP*, Vol 2 No. 1
- Windiarto, (2020). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah
- Windi Oktavia, (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Adreju Pekalongan Kampung Timui, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Zayn Eludra. (2011) Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 1. No. 1 Hal: 21-37 Unive Rasunda, Bandung.